

REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PONOROGO

URUSAN WAJIB/PILIHAN : PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
 NAMA PEMERINTAH DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 NAMA OPD : KEPEGAWAIAN  
 URUSAN PEMERINTAHAN : KEPEGAWAIAN  
 PERIODE YANG DINILAI : 2024

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RESIKO			C/UC	DAMPAK		SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNG KINAN	NILAI RESIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		
			URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK		URAIAN	SUMBER					URAIAN	PIHAK YANG TERKENA
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan tidak tersusun tepat waktu	1.1	Sekretaris	kurangnya ketersediaan data atau data yang dikumpulkan bidang kurang lengkap	internal dan eksternal	C	pelaksanaan program dan kegiatan akan tidak sesuai dengan perencanaan	BKPSDM	2	2	4	melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bidang pemilik data untuk segera menyediakan data-data yang diperlukan
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengumpulan data kurang tidak tepat waktu	1.2	Sekretaris	kurangnya ketersediaan data atau data yang dikumpulkan bidang kurang lengkap	internal	C	membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mendapatkan data yang lengkap	BKPSDM	2	2	4	berkomunikasi dan koordinasi dengan bidang pemilik data secara intens agar segera tercukupi
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah													
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kekurangan Anggaran kas untuk pencairan gaji dan tunjangan	2.1	Sekretaris	Adanya kesalahan perhitungan karena adanya mutasi ASN, Kenaikan Pangkat ASN, dan Perubahan Status ASN	internal dan eksternal	C	Tidak Terbayarkannya gaji dan Tunjangan secara tepat waktu	BKPSDM	2	2	4	Berkomunikasi dengan Bidang Anggaran BPPKAD dalam penentuan besaran anggaran Gaji ASN
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlambatnya pembayaran honor keuangan di awal tahun	2.2	Sekretaris	Memunggu antaran turunnya SK Bupati terkait honor pengelola keuangan	internal dan eksternal	C	tertundanya pengerjaan / pencairan	BKPSDM	2	2	4	melakukan rapelan pembayaran setelah SK Bupati turun
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah													
3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan aplikasi kinerja	3.1	Kabid Pembinaan	baru tahap awal penggunaan aplikasi e kinerja dari BKN	internal dan eksternal	C	apikasi e-kinerja masih belum bisa diterapkan di ponorogo	ASN Ponorogo	2	2	4	melakukan studi tiru ke kabupaten lain yang telah menggunakan aplikasi e-kinerja dari BKN
3.2	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Lambatnya pemenuhan dokumen dari instansi lain terkait pengurusan pensiun	3.2	Kabid Mutasi dan Promosi	SK Pensiun persetujuan teknisnya menunggu dari BKN	internal dan eksternal	C	SK Pensiun datang terlambat/lewat diberikan kepada yang bersangkutan	ASN Ponorogo	2	2	4	Terus berkoordinasi dengan BKN Regional II untuk update informasi Perke Pensiun





No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RESIKO			SEBAB			C/UC	DAMPAK			NILAI RESIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
			URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER	URAIAN		PIHAK YANG TERKENA	SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNGKINAN		
8.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Penempatan tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	ROO.405.26.8.1	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	Belum tersedianya standar kompetensi pejabat. Tidak tersedianya anggaran untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi bagi pejabat administrator	Internal	C	1. Penempatan ASN tidak memenuhi salah satu syarat berdasarkan sistem merit sehingga berdampak pada kinerja 2. ASN yang tidak profesional dan berkompeten	Pejabat Pembina Kepegawaian	2	2	4	1. Dilaksanakannya Asasment Center ( Uji Kompetensi ) 2. Mengajukan anggaran untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi
8.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Keterlambatan pemberian SK Kenaikan Pangkat ASN	ROO.405.26.8.2	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	1. Kurangnya kesadaran ASN untuk mengisi data kepegawaian di Simas Hebat sehingga data kepegawaian kurang lengkap 2. Tidak adanya koordinasi antara ASN ybs dengan Pejabat Pengelola Kepegawaian di masing-masing OPD	Internal dan Eksternal	C	Berkas PMS yang akan Kenaikan Pangkat tidak dapat diproses	Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo	1	2	2	Peningkatan Koordinasi
8.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	Tidak adanya pelamar sesuai formasi yang dibutuhkan	ROO.405.26.8.3	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	Kurang minatnya pejabat untuk mengikuti Seleksi Terbuka JPT Pratama	Internal dan Eksternal	C	Penempatan ASN tidak memenuhi salah satu syarat berdasarkan Sistem Merit sehingga berdampak pada kinerja	Pelabat Pembina Kepegawaian	2	2	4	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada KASN untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan Seleksi Jabatan Tinggi dan melaporkan kembali setelah selesai pelaksanaan.
9	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>													
9.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (PMK)	Terhambatnya rencana peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	ROO.405.26.9.1	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kebijakan dan kewenangan BKN	Eksternal	C	Pengembangan karir ASN terhambat	Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo	2	2	4	Koordinasi dan Sosialisasi
9.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Terhambatnya jlnr/tugas belajar bagi ASN	ROO.405.26.9.2	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Berkas pengajuan jlnr/tugas belajar yang kurang lengkap dan menunggu proses di tingkat BKN	Internal dan Eksternal	C	Pengembangan karir ASN terhambat	Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo	2	2	4	Koordinasi dan Sosialisasi
9.3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Pembinaan Jabatan Fungsional belum dilaksanakan secara maksimal	ROO.405.26.9.3	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	Terikat dengan aturan yang berbeda di dalam induk setiap jabatan fungsional	Eksternal	C	Pembinaan Jabatan Fungsional belum dilaksanakan secara maksimal	Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo	2	2	4	Koordinasi dan Sosialisasi



REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PONOROGO

URUSAN WAJIB/PILIHAN : PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
 NAMA PEMERINTAH DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 NAMA OPD : KEPEGAWAIAN  
 URUSAN PEMERINTAHAN : KEPEGAWAIAN  
 PERIODE YANG DINILAI : 2023

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK		SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNGKINAN	NILAI RESIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
			URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK YANG TERRENA				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sesuai dengan SOP												
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan tidak tersusun tepat waktu	ROO.405.26.1.1	Sekretaris	kurangnya ketersediaan data atau data yang dikumpulkan bidang kurang lengkap	Internal dan eksternal	C	Pelaksanaan program dan kegiatan akan tidak sesuai dengan perencanaan	BKPSDM	2	2	4	melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bidang-bidang pemilik data untuk segera menyediakan data-data yang diperlukan
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengumpulan data dukungan tidak tepat waktu	ROO.405.26.1.2	Sekretaris	Adanya kesalahan perhitungan karena adanya mutasi ASN, kenaikan Pangkat ASN, dan Perubahan Status ASN	Internal dan eksternal	C	membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mendapatkan data yang lengkap	BKPSDM	2	2	4	Berkomunikasi dan koordinasi dengan bidang pemilik data secara intens agar segera tercukupi
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah													
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kekurangan Anggaran kas untuk pencairan gaji dan tunjangan	ROO.405.26.2.1	Sekretaris	Tidak Terbayarkannya gaji dan Tunjangan secara tepat waktu	Internal dan eksternal	C	tertundanya pengentrian / pencairan	BKPSDM	2	2	4	Berkomunikasi dengan Bidang Anggaran BPPKAD dalam penentuan besaran anggaran Gaji ASN
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlambatnya pembayaran honor keuangan di awal tahun	ROO.405.26.2.2	Sekretaris	Memunggu antrian lunasnya SK Bupati terkait honor pengelola keuangan	Internal dan eksternal	C		BKPSDM	2	2	4	melakukan rapelan pembayaran setelah SK Bupati turun
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah													
3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan aplikasi kinerja	ROO.405.26.3.1	Kabid Pembinaan	baru tahap awal penggunaan aplikasi e-kinerja dari BKN	Internal dan eksternal	C	aplikasi e-kinerja masih belum bisa diterapkan di ponorogo	ASN Ponorogo	2	2	4	melakukan studi tiru ke kabupaten lain yang telah menggunakan aplikasi e-kinerja dari BKN
3.2	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun Yang Dipulangkan	Lambatnya pemenuhan dokumen dari instansi lain terkait pengurusan pensiun	ROO.405.26.3.2	Kabid Mutasi dan Promosi	SK Pensiun persetujuan teknisnya menunggu dari BKN	Internal dan eksternal	C	SK Pensiun datang terlambat/lewat diberikan kepada yang bersangkutan	ASN Ponorogo	2	2	4	Terus berkoordinasi dengan BKN Regional II untuk update informasi Pertek Pensiun





No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK		SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNGKINAN	NILAI RESIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
			URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PHAK YANG TERKENA				
8.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Pemertapan tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	8.1	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	Belum tersedianya standar kompetensi pejabat. Tidak tersedianya anggaran untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi bagi pejabat administrator	Internal	C	1. Penempatan ASN tidak memenuhi salah satu syarat berdasarkan sistem merit sehingga berdampak pada kinerja 2. ASN yang tidak profesional dan berkompeten	Pejabat Pembina Kepegawaian	2	2	4	1. Dilaksanakannya Assessment Center (Uji Kompetensi) 2. Mengajukan anggaran untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi
8.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Keterlambatan penerbitan SK Kenaikan Pangkat ASN	8.2	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	1. Kurangnya kesadaran ASN untuk mengisi data kepegawaian di Simas Hebat sehingga data kepegawaian kurang lengkap 2. Tidak adanya koordinasi antara ASN ybs dengan Pejabat Pengelola Kepegawaian di masing-masing OPD	Internal dan Eksternal	C	Berkas PUS yang akan Kenaikan Pangkat tidak dapat diproses	Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo	1	2	2	Peningkatan Koordinasi
8.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	Tidak adanya pelamar sesuai formasi yang dibutuhkan	8.3	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	Kurang minatnya pejabat untuk mengikuti seleksi Terbuka JPT Pratama	Internal dan Eksternal	C	Penempatan ASN tidak memenuhi salah satu syarat berdasarkan Sistem Merit sehingga berdampak pada kinerja	Pejabat Pembina Kepegawaian	2	2	4	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada KASN untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan Seleksi Jabatan Tinggi dan melaporkan kembali setelah selesai pelaksanaan.
9	Pengembangan Kompetensi ASN													
9.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (PMK)	Terhambatnya rencana peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	9.1	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kebijakan dan kewenangan BKN	Eksternal	C	Pengembangan karir ASN terhambat	Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo	2	2	4	Koordinasi dan Sosialisasi
9.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Terhambatnya jln/tugas belajar bagi ASN	9.2	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Berkas pengajuan jln/tugas belajar yang kurang lengkap dan menunggu proses di tingkat BKN	Internal dan Eksternal	C	Pengembangan karir ASN terhambat	Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo	2	2	4	Koordinasi dan Sosialisasi
9.3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Pembinaan Jabatan Fungsional belum dilaksanakan secara maksimal	9.3	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	Terkait dengan aturan yang berbeda di dalam induk setiap jabatan fungsional	Eksternal	C	Pembinaan Jabatan Fungsional belum dilaksanakan secara maksimal	Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo	2	2	4	Koordinasi dan Sosialisasi



No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RESIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNGKINAN	NILAI RESIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	
			URAIAN	KODE RESIKO	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIPAK YANG TERKENA					
12.1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ASN	12.1	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi pegawai yang rendah	Eksternal	C	Banyak pegawai tidak bisa naik pangkat	Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d	2	2	4	Berkoordinasi dengan TAPD agar kegiatan ujian dinas bisa dilakukan setiap tahun.
12.2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kurang minatnya Pegawai untuk mengikuti Kompetensi bagi Pimpinan Tinggi dan tidak terlaksananya kegiatan Latsar bagi CPNS	12.2	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Tidak adanya penerimaan CPNS di Tahun 2022 sehingga tidak dilaksanakan diklat latsar	Eksternal	C	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan menurun	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	3	3	Peningkatan koordinasi

